



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH  
RDP KOMISI IX DPR RI DENGAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN RI (BADAN POM)**

---

Tahun Sidang	:	2014-2015
Hari/Tanggal	:	Rabu, 11 Februari 2015
Masa Persidangan	:	II
Jenis rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Rapat ke	:	
Sifat Rapat	:	Terbuka
Dengan	:	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).
Waktu	:	Pukul 13.00 WIB – selesai
Acara	:	Pendalaman Rincian Program dan Kegiatan RAPBN-P Tahun 2015 Badan POM RI.
Ketua Rapat	:	Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol/ Ketua Komisi IX DPR RI;
Sekretaris Rapat	:	Muhammad Yus Iqbal, SE/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Mezzanine Meeting Room A, Hotel Aryaduta Jl. Prapatan No.44-48 Jakarta
Hadir	:	44 Anggota

**PIMPINAN KOMISI IX DPR RI :**

1. Dede Yusuf Macan effendi, S.T, M.I.Pol (F-PD)
2. H. Syamsul Bachri, M.Sc (F-PG)
3. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si (F-P.Gerindra)
4. H. Asman Abnur, SE.,M.Si (F-PAN)
5. Dra. Hj. Ermalena, MHS (F-PPP)

**F.PDIP :**

6. Alex Indra Lukman
7. Hj. Elva Hartati, S.IP, MM
8. Ir, Ketut Sustiwawan
9. dr. Ribka Tjiptaning

10. Daniel Lumban Tobing
11. H. Imam Suroso, S.Sos, SH, MM
12. Nursuhud
13. Abidin Fikri, SH
14. dr. Karolin Margret Natasa

**F.PG :**

15. Hj. Saniatul Lativa, SE
16. Hj. Dewi Asmara, SH, MH.
17. H.Budi Supriyanto, SH, MH
18. dr. Charles J. Mesang
19. Aditya Anugrah Moha, S.Ked
20. drg. Hj. Andi Fauziah Pujawatie Hatta, SKG

**F.P.GERINDRA :**

21. Khaidir
22. dr. H. Suir Syam, M. Kes.
23. Susi Syahdonna Bachsin, SE, MM.
24. drg. Putih Sari
25. Roberth Rouw.

**F.PD :**

26. Drs. H. Zulfikar Achmad
27. Siti Mufattahah, Psi.
28. Drs. Ayub Khan.
29. dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang
30. Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE.

**F.PAN :**

31. Ir. H.A. Riski Sadig
32. Dr. H.M. Ali Taher Parasong, SH, M.Hum.
33. Hang Ali Saputra Syah Pahan, SH

**F.PKB :**

34. H. Handayani, SKM
35. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA
36. Dra. Hj. Siti Masrifah, MA

**F.PKS :**

37. Anshory Siregar, Lc
38. Drs. H. Chairul Anwar, Apt

**F.PPP :**

39. Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si.
40. Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si.

**F.P.NASDEM :**

41. Irma Suryani Chaniago, SE
42. Ir. Ali Mahir, MM
43. Amelia Anggraini.

**F.P. HANURA :**

44. Capt. Djoni Rolindrawan, SE.,M.MAR, MBA

**ANGGOTA IZIN/SAKIT :**

**UNDANGAN :**

1. Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc (Kepala Badan POM) beserta jajaran

**RAPAT DIBUKA PUKUL 13.45 WIB**

**KETUA RAPAT (DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST., M.Si) :**

**Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati.**

Sesuai dengan Rapat yang dibuka tadi pagi dan dinyatakan diskors tadi setelah dengan Kepala BKKBN dan BNP2TKI maka skors kami cabut kembali.

**(SKORS DICABUT)**

Saya ucapkan selamat datang kepada Kepala Badan POM Pak Roy Sparringga beserta jajarannya, kami ucapkan juga selamat ulang tahun untuk Badan POM yang sebetulnya sudah beberapa hari yang lalu ya Pak tetapi baru dilaksanakan tadi pagi, sesuai dengan permintaan dari Kepala Badan maka Rapat baru kita mulai Pukul 14.00 WIB dan Rapat akan membahas anggaran Badan POM Tahun Anggaran 2015 terutama di RAPBNP.

**Yang terhormat Anggota Dewan Komisi IX DPR RI, yang saya muliakan serta Pimpinan.**

Kami sepakati dahulu bahwa sekarang Pukul 14.00 WIB, kita sampai Pukul 15.00 WIB ya? Kita sepakati sampai Pukul 15.00 WIB ya karena tidak harus terlalu panjang.

**(RAPAT : SETUJU)**

**Bapak Kepala Badan POM,**

Kami sudah mendapatkan surat mengenai pembahasan usulan program kegiatan RAPBNP untuk Badan POM Tahun Anggaran 2015 dan untuk itu karena hari Jumat besok kita harus Paripurna RAPBNP maka kita upayakan ini pembahasan yang terakhir dari rangkaian kita 3 hari dan ini khusus untuk Badan POM kita undur jadinya jam 1, padahal ini Kawan-kawan sudah 3 hari 3 malam tidak tidur Pak, jadi kami persilakan Pak Kepala Badan untuk menyampaikan paparannya.

**KEPALA BADAN POM RI (Dr. A. ROY SPARRINGA, M.APP.Sc) :**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
Salam sejahtera buat kita semua.

**Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Para Anggota Komisi IX DPR RI.**

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan tentu atas karuniaNya kita bisa melaksanakan pembahasan usulan program kegiatan untuk dialokasikan dalam RAPBNP Badan POM Tahun Anggaran 2015, kami sangat menghargai atas waktu khusus untuk Badan POM.

Sebagaimana yang kami sampaikan pada RDP yang lalu tantangan pengawasan obat dan makanan di Indonesia semakin kompleks antara lain tuntutan peningkatan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan kondisi terkini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Badan POM harus mampu mengantisipasi lingkungan strategis, antara lain kemajuan IPTEK telah membawa perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi obat asli Indonesia, makanan, kosmetik dan alat kesehatan dengan menggunakan teknologi modern industri tersebut mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan kisaran yang sangat luas, disamping itu adanya globalisasi menjadi makin tipisnya *entry barrier* dalam perdagangan internasional selain kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi mendorong produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar di berbagai negara dan jaringan eksekusi yang sangat puas menyangkut seluruh strata masyarakat, disisi lain konsumsi masyarakat terhadap produk tersebut juga cenderung terus meningkat seiring dengan perbaikan tingkat ekonomi perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya, sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman, dilain pihak iklan, promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan sering kali tidak rasional perubahan tekonologi, produksi sistem perdagangan internasional, gaya hidup tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dan implikasi yang luas pada kesehatan.

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut Badan POM harus terus menerus mengembangkan sistem dan infrastruktur yang mendukung tugas pengawasan obat makanan yang efektif dan efisien agar mampu mendeteksi, mencegah, mengawasi produk obat makanan dalam rangka melindungi keamanan, keselamatan, kesehatan konsumennya baik dalam maupun di luar negeri, salah satu faktor pendorong untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan adalah dukungan sumber daya yang memadai, sesuai dengan surat Deputi Bidang Persidangan tanggal 30 Januari 2015 agenda yang dibahas RDP hari ini pembahasan usulan program kegiatan untuk dialokasikan dalam RAPBN Perubahan Badan POM Tahun Anggaran 2015, sehubungan dengan hal tersebut maka RDP kali ini akan kami paparkan secara singkat usulan Badan POM APBNP Tahun 2015, kami berharap masukkan dari Bapak Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi IX DPR RI.

**Bapak Ketua, Wakil Ketua, Para Anggota Komisi IX DPR RI yang kami hormati.**

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan tanggal 24 September 2014 bahwa alokasi anggaran Badan POM Tahun 2015 adalah sebesar Rp.1.221 triliun lebih dengan postur anggaran Badan POM berdasarkan program adalah program pengawasan obat makanan dengan total

Rp.853.455 miliar lebih, program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan POM dengan total anggaran Rp.339.022 miliar atau 27,7% dan ketiga, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan POM dengan total anggaran Rp.28,916 miliar lebih atau sebesar 2,37% dari total anggaran Badan POM Tahun 2015. Menindaklanjuti surat Menteri Keuangan sebelumnya yaitu 1 Desember 2014 perihal penyiapan kebutuhan belanja prioritas nasional RAPBNP Tahun 2015 Badan POM telah mengusulkan tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja prioritas nasional guna menunjang dan mendukung capaian target kinerja Pemerintah yaitu melalui pertama, upaya mengurangi dampak globalisasi melalui pembentukan pusat kewaspadaan dan penanggulangan permasalahan obat dan makanan. Globalisasi menjadikan perdagangan antar negara menjadi semakin meningkat karena kemajuan dan kondisi geografis perbatasan antar negara tidak lagi menjadi penghalang masuknya komoditas barang dan jasa terkait produk obat dan makanan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah berpindahnya resiko kesehatan melalui obat dan makanan yang beredar namun tidak memenuhi ketentuan, selain itu pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN meningkatkan arus perdagangan di tingkat regional, pemerintah merasa perlu untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari produk obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, kualitas dan keamanan produk obat dan makanan nasional perlu diperbaiki supaya memiliki daya saing di tingkat ASEAN serta menjadi tuan rumah di negeri sendiri. *Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed* atau disingkat INRASFF telah dikembangkan sebenarnya Tahun 2008 sebagai salah satu sistem pengawasan *push market* yang memfasilitasi komunikasi dan koordinasi cepat, tepat menindaklanjuti permasalahan keamanan pangan baik ditemukan di pasar domestik maupun di pintu importasi. Sistem ini juga berperan dalam meningkatkan daya saing produk pangan nasional melalui respon cepat melalui notifikasi penolakan produk ekspor Indonesia di luar negeri, mekanisme dan prosedur kerja INRASFF telah dikembangkan sejak Tahun 2011 dan telah diimplementasikan secara lintas sektor untuk menindaklanjuti kasus-kasus karena pangan yang terjadi di Indonesia, namun memang perlu terus penguatan kerja sama lintas sektor.

Sebagai langkah selanjutnya, Badan POM mengusulkan untuk mengembangkan sistem tersebut tidak hanya menyangkut produk pangan namun juga produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, oleh karena itu Badan POM perlu membentuk pusat kewaspadaan dan penanggulangan permasalahan obat dan makanan yang tujuannya antara lain meningkatkan perlindungan konsumen dengan meminimalkan resiko kesehatan yang disebabkan obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat melalui aksi cepat terhadap produk tidak memenuhi syarat yang ditemukan di pasaran domestik dan pintu infotasi. Meningkatkan daya saing produk dan makanan obat nasional melalui respon cepat terhadap notifikasi penolakan produk ekspor kita di luar negeri sering kali kami memperoleh notifikasi dan respon kita harus cepat, meningkatkan kewaspadaan terkait obat dan makanan pada situasi darurat bencana, meningkatkan sinergi lintas sektor obat dan makanan melalui suatu mekanisme kewaspadaan dan penanggulangan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab spesifik bagi tiap instansi Kementerian lembaga pusat

dan di daerah, meningkatkan peran masyarakat dan sistem kewaspadaan obat dan makanan dan juga sebagai wadah komunikasi resiko obat dan makanan, isu obat dan makanan selalu sensitif, jadi kami harus mempersiapkan persiapannya sehingga kita harus cepat merespon dengan positif, ini sangat amat penting bagi Indonesia kesiapsiagaan kita harus kita perkuat. Program tersebut membutuhkan tambahan sebesar Rp.81.750.050.000,- (*Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Lima Puluh Juta Rupiah*).

Kemudian yang kedua, adalah pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan Timur Indonesia atau daerah perbatasan yaitu melalui ada dua, pertama, pemenuhan sarana prasarana dan infrastruktur balai POM baru di Sofifi yaitu Provinsi Maluku Utara dan di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, dalam rangka mengoptimalkan serta memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan utamanya di daerah timur Indonesia dalam rangka melindungi masyarakat dan produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat pada Tahun 2014 telah ditetapkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 17 Oktober 2014 tentang persetujuan pembentukan Balai POM baru di Sofifi Maluku Utara dan di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, dengan dibentuknya dua unit balai pengawas obat makanan di Mamuju dan di Sofifi maka diperlukan pemenuhan sarana dan prasarana dan infrastruktur sebagai pendukung pengawasan obat dan makanan di dua provinsi tersebut berupa dua pembangunan gedung laboratorium obat dan makanan, pengadaan alat laboratorium serta kendaraan laboratorium klining berikut dukungan untuk operasional pengawasan, untuk itu diperlukan tambahan anggaran dari kegiatan yang berkaitan itu pengawasan obat dan makanan di 31 balai besar balai POM sebesar Rp.37 miliar.

Yang kedua adalah pengembangan Pos POM di daerah perbatasan dan di daerah yang sulit terjangkau dari ibukota provinsi, dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan makanan di daerah, saat ini badan POM memiliki unit pelaksanaan teknis UPT balai besar, balai POM di 33 Provinsi pada wilayah kerja UPT dapat dibentuk pos pon sebagai perpanjangan unit kerja dan balai besar, balai POM yang bersangkutan. Pos POM dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan di wilayah yang secara geografis mempunyai jangkauan cukup luas wilayah perbatasan negara daerah yang sulit dijangkau, wilayah administrasi provinsi baru, pelabuhan atau bandar udara, hingga saat ini badan POM memiliki 10 Pos POM yang termasuk ke dalam 7 cakupan kerja balai besar, balai POM antara lain seperti di dalam tabel tersebut yaitu Pos POM di Atambua adalah daerah perbatasan dengan Timor Leste kedua Pos POM di Ende, di daerah yang sulit terjangkau di Ibukota Provinsi di Nusa Tenggara Timur kemudian Pos POM di Ntikom daerah perbatasan negara dengan Malaysia, Pos POM di Aruk daerah perbatasan dengan Malaysia dan dua Pos POM terakhir yang kami sebutkan adalah wilayah administrasi provinsi Kalimantan Barat. Untuk wilayah administrasi Provinsi Maluku Utara ada Pos POM di Ternate daerah yang sulit terjangkau dari Ibukota Provinsi dan ini lebih berkembang dimana penduduknya sangat cukup padat, ke enam Pos POM di Tahuna adalah di wilayah Sulawesi Utara daerah perbatasan negara dengan Filipina Pos

POM di Tarakan daerah perbatasan dengan Malaysia Kalimantan Utara, Pos POM di Bau-bau daerah yang sulit terjangkau dari ibukota provinsi Sulawesi Tenggara, Pos POM di Bima daerah yang sulit terjangkau di ibukota provinsi Nusa Tenggara Barat dan ke-10 Pos POM di Merauke daerah perbatasan negara dengan Papua Nugini di Papua. Berdasarkan hasil evaluasi diidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam operasionalisasi Pos POM secara umum yaitu keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana terutama bidang pengujian, selama ini pengujian yang dilakukan hanya bersifat sederhana saja seperti Repdikeskkit yang hanya menguji cepat kandungan boraks, formalin, (tidak jelas), sedangkan sample yang membutuhkan alat spesifik harus merujuk ke Balai besar Balai POM, ini membutuhkan tambahan anggaran Rp.25 miliar sehingga total kebutuhan tambahan anggaran Badan POM untuk Tahun 2015 sebesar Rp.143.750.000.000,- (*Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan demikian apabila usulan APBNP Badan POM disetujui maka anggaran Badan POM yang semula Rp.1.221.594.280.000,- (*Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) menjadi Rp.1.365.344.280.000,- (*Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

**Bapak, Ibu Pimpinan, Anggota DPR RI yang terhormat.**

Sebagai penutup telah dikemukakan sebelumnya pengawasan obat dan makanan memerlukan dukungan sistem, infrastruktur, sumber daya terutama SDM yang paling penting bagi suatu organisasi di era globalisasi dan pasar bebas ini masyarakat semakin memerlukan jaminan agar terhindar dari obat makanan yang tidak memenuhi syarat, yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan demikian tugas pengawasan obat, makanan menjadi semakin luas dan kompleks sebagai organisasi dengan biaya operasional yang tinggi antara lain untuk peralatan Lab, pemeliharaan berbagai (tidak jelas), media, buku perbandingan pengadaan sample, biaya pemeriksaan, penyidikan dan serta tuntutan pemenuhan berbagai menempatkan badan POM pada situasi yang penuh tantangan antara tuntutan masyarakat serta keinginan memberikan perlindungan yang maksimal. Dukungan sumber daya yang memadai akan operasional pengawasan obat, makanan termasuk balai pusat balai pos POM yang tersebar di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan efektif, untuk itu kami mohon dukungan Bapak, Ibu Pimpinan, Anggota Komisi IX DPR RI untuk usulan tambahan anggaran APBNP Tahun 2015 sehingga perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak mempunyai ketentuan dapat dilaksanakan secara optimal seperti yang diharapkan.

Atas perhatian Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI kami ucapkan terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



## **KETUA RAPAT :**

Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Badan POM.

Jadi, sebagaimana yang kita sama-sama saksikan ada keinginan untuk menambah anggaran sebesar Rp.143.750.000,- (*Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*). Ini Pak Kepala Badan ini kelihatannya masih malu-malu mintanya Pak ya, jadi dengan 143 ini kita lihat masih fokus kepada infrastruktur di beberapa daerah juga peningkatan SDMnya tentunya, namun pada dasarnya saya pikir ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua untuk melakukan satu pencegahan atau program *quick win* ini karena ternyata cukup banyak akhir-akhir ini kita mendengar permasalahan-permasalahan makanan atau obat-obatan yang bermasalah, baru-baru ini kami mendengar ada jajanan coklat yang dibagikan dengan menggunakan alat kontrasepsi itu saya pikir ini harus menjadi perhatian kita semua, nah kalau anggotanya tidak cepat tanggap ini akan berbahaya juga nanti buat generasi kita.

Baik, Bapak-bapak, saya pikir kami persilakan sekarang Anggota untuk melakukan pendalaman terhadap anggaran ini, kami persilakan hanya ada satu sayap ini sebelah kanan saya dimulai dari Ibu Okky dulu.

Silakan.

## **F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M. Si) :**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI yang saya hormati.  
Bapak Kepala POM beserta jajaran yang saya hormati.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak untuk paparannya.

Saya akan langsung saja menyoroti mengenai tambahan anggaran juga alasannya kenapa Bapak mengajukan dan tempat-tempatnya. Seperti misalnya dengan anggaran tahun ini sebesar Rp.37 miliar, Bapak hendak membuat infrastruktur sarana, prasarana balai POM baru di dua Provinsi yaitu di Maluku Utara dan Sulawesi Barat, pertanyaan saya kenapa pilih dua Provinsi itu Pak? Mungkin nanti ya penjelasannya kenapa dua provinsi ini.

Kemudian, yang kedua, dalam jumlah yang Rp.37 miliar itu Bapak juga menulis kendaraan laboratorium keliling, saya ingin tahu mobil apa yang akan dibeli begitu sebagai kendaraan laboratorium keliling apakah sama seperti Jakarta karena saya pernah lihat warnanya hijau begitu, apakah sama seperti itu dan bagaimana dengan rekrutmen SDMnya ketika Bapak kemudian membangun Badan POM ini di dua provinsi tersebut dan untuk pembentukan pusat kewaspadaan dengan anggaran yang paling besar diantara jumlah total yang hendak Bapak ajukan, saya tertarik dengan meningkatkan perlindungan konsumen dengan meminimalkan resiko kesehatan yang disebabkan obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat melalui aksi cepat *need action* apa itu program aksi cepat itu begitu ya, karena kayak kemarin saya pernah diundang begitu dengan

ditemukannya pabrik saos tomat yang sudah kadaluarsa di Lampung, sementara juga kemudian murid di Tasikmalaya terkena kontaminasi, nah yang disebut dengan *immediate action*nya seperti apa Pak? Karena saya berharap tentu kinerja Badan POM tidak hanya seperti pemadam kebakaran kalau ada laporan baru grasah grusuh gitu, saya ingin tahu ini *immediate action*nya berupa apa dan berapa anggarannya diantara 6 action yang hendak Bapak lakukan itu.

Kemudian, yang ke empat, masih dengan jumlah yang 81 sekian miliar ini meningkatkan sinergi lintas sektor, apakah ini yang dimaksud dengan Satgas yang kemarin Bapak pernah presentasikan di ruang Komisi IX DPR RI karena terus terang Pak saya sangat berharap bahwa Satgas ini memang betul-betul bisa bekerja cepat, sebelum ada undang-undang yang kita ajukan itu, karena kalau tidak ada atau undang-undang itu tidak ada maka *law enforcement* nya mungkin bisa diberikan oleh satgas ini begitu, nah saya ingin tahu penjelasan lebih dalam mengenai meningkatkan sinergi lintas sektor ini dan sinergi lintas sektor ini apakah kemudian *leading* sektornya badan POM begitu ya da yang terakhir poin yang ke-6 jumlah Rp.81.750.000,- miliar itu salah satunya juga adalah sebagai wadah komunikasi resiko obat dan makanan, itu membentuknya Pak dan kira-kira berapa anggaran yang Bapak mau alokasikan untuk ini.

Terima kasih Pimpinan.

Lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin

*Wabilahi Taufik Wal Hidayah,*

*Wassalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT :**

Terima kasih Ibu Okky.  
Pak Ketut silakan.

#### **F-PDIP (Ir. KETUT SUSTIAWAN) :**

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin mendalami hal yang terkait dengan tambahan anggaran yang disampaikan Pak Kepala Badan POM dan jajarannya yang saya hormati.

Tadi dalam paparan tadi ada permohonan tambahan 143 miliar lebih dari APBN Tahun 2015, saya kira sesuai dengan RDP sebelumnya dan kebijakan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dari obat dan makanan khususnya daerah perbatasan dan terluar yang sulit dijangkau dari Ibukota Provinsi, saya kira kita sudah mengetahui bahwa sudah ada persetujuan untuk pembentukan balai besar yang tadi di Sofifi dan Mamuju, saya kira Menpan RB sudah memberikan persetujuan. Oleh karenanya, sebagai konsekuensinya tentu harus disiapkan infrastrukturnya dan untuk itu saya bisa memahami apa yang disampaikan untuk pemenuhan infrastruktur, sarana prasarana pada balai POM di Sofifi dan Mamuju, nah tentu ini terkait dengan penambahan anggaran ini dan yang kedua adalah bagaimana meningkatkan pos POM di daerah-daerah yang terluar, jadi ada 10 pos POM yang disampaikan, saya kira ini perlu menjadi perhatian kita

dan perlu kita kaji bersama Komisi IX DPR RI khususnya dalam pemenuhan anggaran tambahan ini. Nah, pertanyaan saya tentu terkait dengan adanya persetujuan untuk pendirian balai besar di dua Provinsi tadi sejauh ini berapa pemenuhan atau sudah adakah persetujuan dari Menteri Keuangan? Karena tadi belum disampaikan berapa dapatnya padahal ini Tahun 2014 sudah disetujui pembentukan balai besar ini, tetapi belum tercermin dan kita pembahasan APBNP ini hanya tinggal memiliki waktu 1 hari, kalau tadi Pimpinan menyampaikan Jumat sudah Paripurna nah tentu ini menjadi bahan kajian kita, jika memungkinkan pada pembahasan kali ini jika tidak mungkin ini sebagai catatan tahun 2016 begitu, jadi saya kira itu yang pertama.

Yang kedua, masih soal anggaran ini, dari tiga program yang disampaikan program pengawasan obat dan makanan kemudian ada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan yang ketiga, program peningkatan sarana prasarana aparatur. Jadi, dari ketiga program ini permintaan tambahannya hanya pada program pengawasan obat dan makanan, nah terkait dengan perlindungan masyarakat tadi sudah diantarkan juga oleh Pimpinan dan kawan yang lain bahwa ini terkait dengan makanan, jajanan anak sekolah dan sebagainya, jika anggaran ini tidak bisa terpenuhi kira-kira bagaimana Badan POM ini memaksimalkan, mengoptimalkan satu tadi balai besar POM yang mau dibentuk, pos POM tadi yang diperbatasan dan ketiga juga tanpa mengesampingkan tugas atau TU Poksi dari Badan POM terhadap pengawasan ini khususnya, jadi kita tidak tadi yang pertama saya bicara daerah terluar, daerah perbatasan, ini sekarang kita masuk daerah perkotaan, saya kira daerah perkotaan ini yang sering setiap saat kita juga sering mendengar bahwa yang paling memprihatinkan tentu adalah bagaimana kita melindungi anak didik atau siswa itu dari jajanan sekolah yang demikian banyak, nah ini saya kira bagaimana mengoptimalkan anggaran ini dan tentu yang paling penting adalah bagaimana melakukan secara terus menerus pengawasan ini tidak hanya pada kasus tertentu tetapi bagaimana memberikan advokasi, memberikan informasi, memberikan edukasi pada masyarakat sehingga ini bisa sasaran dari tugas dari Badan POM ini bisa total, bisa menyeluruh, tidak hanya perbatasan yang mendapat tambahan anggaran tetapi seluruh dari perlindungan kita pada nasib anak bangsa dari perlindungan terhadap bahan obat dan makanan ini. Saya kira itu Pimpinan yang saya sampaikan.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Ketut.

Jadi memang Pak Kepala Badan waktu kita sebenarnya cuman hari ini dan mungkin hanya hari ini ya, hari ini kita harus menyerahkan ke Banggar, jadi artinya kalau ingin benar-benar ini menjadi satu kesimpulan Bapak harus memberikan keyakinan kepada Komisi IX DPR RI dulu betapa pentingnya alokasi ini dan mungkin ya harus kita laporkan ke Banggar juga.

Silakan dari Anggota yang lain mungkin, Ibu Siti Masrifah.

**F-PKB (Dra. Hj. SITI MASRIFAH, MA) :**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh sahabat Bapak, Ibu Komisi IX DPR RI,**

**Yang kami hormati Bapak Kepala Badan POM Republik Indonesia beserta seluruh jajaran.**

Ini saya ingin menanyakan sesuatu, mungkin berangkat dari ketidaktahuan saya, pertama, saya ingin menanyakan kepada Bapak Kepala Badan POM tadi di dalam uraian yang ada di dalam presentasi ini Bapak menyebutkan yang pertama ada yang namanya balai besar POM, itu Bapak disitu sebutkan ada di 33 Provinsi begitu. Kemudian, yang kedua, Bapak juga sebutkan ada yang namanya Pos POM yang itu hanya ada di 10 Provinsi kalau tidak salah, saya ingin bertanya apa perbedaan fungsi antara Balai POM besar dengan Pos POM, satu itu.

Yang kedua, kalau tidak salah ada ucapan juga apa di balai POM nya atau pun di pos POMnya bisa melingkupi beberapa wilayah dan saya ingin penjelasan ini seperti apa begitu. Kemudian, Pos POM hanya ada di 10 wilayah, saya ingin tahu 10 wilayah yang menjadi prioritas untuk didirikan Pos POM ini alasannya apa disitu dibentuk Pos POM begitu. Soal total kebutuhan tambahan anggaran yang kedua, saya ingin bertanya kepada Bapak, Bapak sebutkan bahwa ada untuk peningkatan pengawasan obat dan makanan perlu 3 hal yang ditingkatkan tadi Bapak sebutkan ada sistem, infrastruktur dan SDM. Tadi yang poin kedua sudah ditanyakan oleh Mbak Okky, saya ingin bertanya di poin kesatu, disitu Bapak tulis pembentukan pusat kewaspadaan dan penanggulangan permasalahan obat dan makanan, angkanya cukup besar Rp.81.750.000- miliar, saya ingin tahu dengan dana seperti itu bisa membentuk pusat kewaspadaan penanggulangan permasalahan obat dan makanan ini, membentuk pusat kewaspadaan penanggulangan permasalahan obata dan makanan di beberapa tempat, terus seperti apa model dari pusat kewaspadaan ini, saya ingin penjelasan sebelum kami menyetujui bahwa ini akan menjadi APBNP. Saya kira itu.

Terima kasih atas perhatiannya.

Oh iya saya Siti Masrifah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Banten III Tangerang Raya.

*Wallahu Muwafiq Ila Mutoriq,*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Tetapi yang Kepala Badan ini bukan dari NU Bu.

Silakan Pak Ayub, jangan lupa menyebutkan Dapilnya biar dicatat oleh Pak Kepala Badan.

**F-PD (Drs. AYUB KHAN) :**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi IX DPR RI dan yang saya hormati Kepala Badan POM RI segenap jajarannya.**

Saya Ayub Khan dari Dapil Jember Lumajang Jati IV ya, dari Fraksi Partai Demokrat.

Sebenarnya tadi yang ingin saya tanyakan sudah disampaikan oleh Rekan kami Mbak Siti maupun Mbak Okky dan kami sepakat sebenarnya dengan tambahan anggaran yang diajukan oleh Badan POM, tetapi kami sedikit memberikan satu kasus terkait tadi program yang disampaikan untuk penanggulangan permasalahan obat yaitu senilai Rp.81 miliar dan disini ada beberapa tadi yang salah satunya adalah meningkatkan kewaspadaan terkait obat dan makanan pada suatu darurat bencana, saya memberikan satu contoh di daerah Cilacap terkait masalah obat tradisional sebenarnya ini kalau saya melihat sudah merupakan suatu situasi darurat bencana karena obat-obat yang diproduksi itu sudah bukan lagi obat tradisional tetapi sudah zat-zat kimia yang sudah berbahaya sekali buat organ tubuh kita, saya pikir dari Bapak Badan Kepala POM juga sudah memahami, jadi nantinya apabila ini terealisasi anggaran saya pikir apa yang akan dilakukan dengan keadaan darurat bencana yang seperti yang saya sampaikan. Mungkin itu saja Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

**F-PD (SITI MUFATTAHAH, Psi) :**

Pak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Ya silakan Bu Siti.

**F-PD (SITI MUFATTAHAH, Psi) :**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Ketua.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI serta Kepala Badan POM beserta jajarannya.**

Saya Siti Mufattahah dari Dapil Jabar 11 Garut dan Tasikmalaya, dari Fraksi Partai Demokrat.

Pada prinsipnya, pada dasarnya apa yang Bapak ajukan itu adalah sebuah pengajuan yang memang seharusnya diajukan begitu ya baik bahwa ini adalah pengajuan yang kami tunggu sebenarnya tetapi Pak pengajuan yang Bapak ajukan 143 miliar sekian ini kami harapkan itu dioptimalkan, ini pengalaman dari dulu-dulu Pak Kepala Badan bahwa BPOM ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi agak malu-malu begitu ya, jadi kami juga agak bingung kalau misalnya mendukung sesuatu niat yang masih belum bisa ditangkap apa namanya semangatnya seperti apa begitu, jadi dari dulu memang BPOM ini selalu kecil pengajuan anggarannya, ini jadi pertanyaan bagi kami kenapa sebenarnya kok tidak berani besar, apakah memang belum terpikirkan untuk sebuah program-program yang menjadi terobosan dalam mengatasi berbagai masalah yang kaitannya dengan TU Poksi Bapak ataukah karena tidak dikasih anggarannya begitu ya, saya pikir kalau Bapak mengajukan anggaran besar pun masih menjadi pertimbangan atau mungkin bisa di dukung semaksimal mungkin kalau memang diberikan penjelasan yang baik tentang strategi maupun terobosan-terobosan yang akan menjadi kinerja Bapak berikutnya, Kementerian Keuangan tetapi tolong optimalkan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang memang kaitannya mengantisipasi atau mengatasi berbagai macam masalah di bidang Bapak jadinya begitu. Kalau disini disampaikan itu lebih fokus kepada pusat kewaspadaan, pembentukan pusat kewaspadaan kemudian pembangunan infrastruktur dan pengembangan Pos POM, ya Pak ini kenapa tidak dari dulu ini menjadi perhatian Bapak, kenapa baru muncul sekarang? Sebenarnya kan Bapak juga bisa meminta dari dulu, karena ini kan bagian dari rumah Bapak yang harus Bapak bangun di Daerah-daerah yang memang perlu dibangun begitu.

Kemudian, yang ingin saya soroti lagi atau mungkin saya ingin tekankan meski pun kita sudah melakukan pendalaman sebelumnya kaitannya dengan optimalisasi, optimalkan di bidang pengawasan dan sosialisasi, saya tekankan kembali karena ini adalah fungsi utama dari Bapak, dari Badan POM bahwa kinerja Bapak itu berada pada dua tugas besar yaitu pengawasan dan sosialisasi, kare dengan tugas itulah maka anggaran yang sebesar Rp.853 miliar yang itu kaitannya dengan program pengawasan obat dan makanan itu menjadi tolak ukur keberhasilan dari Badan POM ini dan kami berharap sinergitas antara DPR RI dengan BPOM tetap terjaga seperti biasanya dan mungkin bisa dioptimalkan dan kami juga berharap dari Teman-teman sekalian yang di Banggar juga dari Komisi memperjuangkan anggaran BPOM ini bisa ditingkatkan kembali dan khususnya untuk undang-undang itu juga terus di dukung atau dipersiapkan sehingga Bapak bisa lebih memiliki *power* dalam menjalankan tugas.

Mungkin itu Pimpinan.

Terima kasih atas perhatiannya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Walaikumsalam.*

Jadi Ibu Siti mendukung untuk besar Pak anggarannya.  
Saya persilakan Anggota lain, silakan Pak Ali Taher.

**F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH., M.Hum) :**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya Muhammad Ali Taher dari Banten III, Tangerang Kota, Kabupaten dan Tangsel, Nomer A-495.

Saya mohon maaf terlambat hadir karena lagi taziah.

Kemudian, yang kedua, meskipun saya terlambat saya membaca secara cepat ini dari satu sisi kelembagaan BPOM itu belum ada kepastian yuridisnya undang-undangnya tetapi tingkat ekspansinya cukup tinggi, kalau kita baca di presentase terakhir ya postur anggaran Badan POM Tahun 2015 ada tiga, masing-masing program pengawasan obat dan makanan kemudian program dan seterusnya, kemudian program peningkatan sarana. Yang ingin saya tekankan itu adalah sekarang ini memantapkan kelembagaan yang sudah ada dulu, ekspansi tetapi dasar hukumnya itu belum maksimal itu juga bagaimana memaksimalkan itu sehingga ketika saya pernah bersama Pak Sutomo ya di Banten TV Pak ya? Saya mengatakan bahwa ya BPOM itu seperti selimut pendek ditarik ke atas bawahnya kelihatan, ditarik kebawah atasnya kelihatan, selimutnya kependekan. Jadi, saya pikir ekspansi perlu tetapi memantapkan konsolidasi BPOM ini jauh lebih penting ya, karena apa? Kelembagaan itu kan perlu kita kejar dalam undang-undang sekian segera kita usulkan itu, supaya kepastian tugas-tugas pokok itu bisa berjalan dengan baik, apalagi saya lihat di dalam program yang baru ini saya setuju saja tetapi kok rasanya belum terlalu pas, kalau sudah dimantapkan tidak apa-apa, misalnya ada pembentukan lembaga baru namanya PKPOM, ini saya menggunakan istilah saudara ya, upaya mengurai dampak globalisasi melalui pembentukan pusat kewaspadaan obat dan penanggulangan permasalahan obat dan makanan, kalau saya singkat PKP2OM kira-kira begitu ya, artinya maksimalkan dulu tugas-tugas yang ada atau lembaga ini menurut saya boleh-boleh saja tetapi mantapkan dulu kinerja internal kita yang mengawasi kelembagaan dari pusat, provinsi dengan kabupaten dan kota, dengan membangun kemitraan dengan pemerintah daerah itu jauh lebih dibutuhkan pada saat sekarang, kalau globalisasi saya kebetulan punya 14 buku tentang globalisasi itu, globalisasi itu intinya kan mensinerginya kepentingan dunia dalam satu sistem, tandanya kan terkait telekomunikasi, transportasi kemudian yang ketiga itu perdagangan. Dampaknya juga tiga, satu, fashion, dua, food dan ketiga fun.

*Food* ini yang merupakan bentuk dari globalisasi mungkin dalam perspektif saya itu yang mau dikedepankan supaya pencegahannya itu loh tetapi di kebutuhan kita sekarang ini adalah masyarakat pada akar rumput itu memerlukan perlindungan dan pengawasan dari BPOM untuk supaya kesehatan makanan dan perlindungan itu dijamin, nah itu perlu kelembagaan yang matang, nanti kalau ada lagi lembaga baru, kewaspadaan yang waspada saja belum kok bikin yang baru dan program

yang dikejar bukan lagi kepentingan rakyat itu yang dikejar, kalau saya mohon maaf. Tetapi prinsip dari substansi perjuangan Saudara-saudara untuk mewujudkan ini saya setuju saja, apalagi anggaran juga menurut saya juga belum terlalu besar untuk ukuran ini 81 miliar lebih, apalagi menurut saya juga sasaran atau enam poin yang saya jadikan pusat waspada saya kira belum semuanya bisa mengcover apa yang Saudara maksudkan ke dalam istilah itu.

Yang kedua, menyangkut pemerataan pembangunan antara wilayah terutama kawasan timur Indonesia daerah perbatasan, ini kalau mau betul-betul sulit terjangkau untuk Timur itu ya bukan Ende, Atambua betul tetapi Ende ini mungkin ada pertimbangan politik karena dia bukan daerah perbatasan, dia lebih mudah dijangkau dibandingkan dengan Laratuka atau Alor, saya itu orang sana kebetulan. Kemudian, Kalimantan Timur itu bukan di Tarakan akses tiap hari 7-8 penerbangan, mungkin yang dimaksud ini Nunukan, karena apa? Nunukan itu kan transit antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Malaysia untuk hilir mudiknya masyarakat dengan membawa berbagai macam *supply and demand* kebutuhan obat-obatan dan makanan, kalau kriterianya itu sehingga ketika muncul anggaran itu saya kira sehingga ketika muncul anggaran itu saya kira misalnya 25 miliar, jadi kebetulan saya agak paham depologi Kalimantan dan juga Indonesia Timur karena memang saya sering kesana.

Kemudian terakhir Saudara-saudara sekalian, peningkatan anggaran APBN dari 1,2 menjadi 1,3 setuju saja hanya saja mungkin saya ingin menekankan pada tingkat efisiensi, kemudian tingkat efektivitas dan produktivitas, itu yang perlu saya tekankan itu. Efisiensi itu artinya diukur dengan apa sih? Diukur dengan angka-angka, ada indikator yang bisa diukur, misalnya efisiensi itu diukur dengan angka-angka kemudian programnya 1,3 triliun kemudian ada terjadi penghematan berapa, kemudian sisanya berapa atau seluruhnya bisa diserap itu bisa dilihat, tetapi yang kedua adalah efektif, efektif itu indikatornya bukan angka, tetapi indikatornya adalah kepuasan, *customer satisfaction*, nah kepuasan inilah yang ingin kita lihat. Di masyarakat kita orang tidak mengenal BPOM, tidak mengenal rata-rata tidak mengenal, saya ini guru, saya ini ngajar ya saya punya sekolah, itu makanan yang di kota kabupaten saja tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengawasi, saya kepengen maksudnya kita harus fokus bahwa pengawasan makanan dan obat ini betul-betul menjadi sebuah kebutuhan masyarakat agar kita memahami dan sekaligus menikmati apa yang disebut dengan yang kualitas itu.

Kemudian, yang ketiga, ukuran efisien, efektif kemudian produktivitas tenaga kerja kita, saudara penyidik kita ini kan baru 500 orang, begitu Pak ya? Bagaimana bisa menjangkau 504 kabupaten dan kota dengan berbagai macam tingkat permasalahannya, jadi kalau bagi saya tidak rasional kecuali Saudara menumpangkan kepada penyidik pegawai negeri sipil yang lain tetapi itu kan tidak efektif juga.

Terakhir yang kedua ini, bagaimana mekanisme hubungan antara BPOM dengan Majelis Ulama Indonesia kaitan dengan persoalan halal dan tidaknya makanan dan obat-obatan, saya hanya ingin menekankan bahwa jangan skeptis terhadap persoalan-persoalan halal dan haram karena halal dan haram, mohon maaf bukan menggurui, saya ini bukan ulama, bukan ustad tetapi suka ngomongnya sok-sok ustad bahwa yang



disebabkan halal itu kan artinya cara, cara mendapatkan, cara mengolahnya itu dalam perspektif syariah itu artinya sesuatu yang dibolehkan makanya ada disebut halal toyib, rejeki itu dapatnya halal toyib, halal itu cara mendapatkan, cara mengolahnya, toyib itu cara menggunakannya dalam bahasa hukum yang sederhana, *very simple*, nah oleh karena itu menurut saya kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia itu sangat penting, kemudian pentingnya itu ada dua hal, pertama itu hubungan kelembangaan itu harus mesra supaya kemesraan itu tidak cepat berlalu, yang kedua, itu aspek yuridis formalnya umat Islam itu mohon maaf karena sebagian besar merasa nyaman ketika mengkonsumsi itu, nyaman itu penting, nyaman ini kaitan dengan kebutuhan spritualisme manusia, jadi oleh karena itu menurut hemat saya perlu kordinasi dengan MUI, dengan Nahdatul Ulama maka ada Partai namanya Partai Kebangkitan Bangsa itu Nahdatul artinya Kebangkitan. Jadi, ada juga Muhammadiyah, ada juga Alwasliyah, ada juga Persis, ada juga yang lain-lain itu supaya dilakukan kordinasi, karena mereka mengatakan bahwa itu haram itu produk apa pun pasti menjadi tidak laku di pasaran sementara kita menggairahkan masyarakat untuk bisa melahirkan produk makanan yang halal yang kemudian bisa dikonsumsi orang, saya kira ini penting sekali. Jadi, dalam perspektif membangun persoalan makanan, obat-obatan perspektif kita jangan, jangan perspektif lembaga kita BPOM atau DPR RI tetapi dalam bahasa yang lebih umum perspektif kita, bukan aku, bukan kami tetapi kita, artinya kita itu kebutuhan ya. Oleh karena itu, kalau itu yang terjadi maka BPOM itu hadirnya berwibawa, bermartabat, memberi manfaat kemudian sekaligus juga menjadi solusi dalam rangka meningkatkan kualitas bangsa Indonesia yang kita cintai, jadi ketika menjawab konstitusi Pasal 28a maka *setiap Warga Negara berhak memperoleh hidup layak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang prima*.

Terima kasih Saudaraku Ketua yang terhormat, Dede yang Macan Yusuf orangnya luar biasa, berani tegas sekaligus juga produktif.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Ali Taher.

Jadi, sekian panjang itu Pak intinya cuman di kalimat mesra ini Pak, mohon ini menjadi pemikiran kita semua.

Pak Djoni Rolindrawan.

#### **F-HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE.,M.MAR, MBA) :**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan serta Rekan-rekan Anggota Komisi IX DPR RI,  
Bapak Kepala Badan POM RI beserta jajaran.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Salam sejahtera buat kita semua.**

Kelihatan pertanyaan, tanggapan disampaikan banyak oleh Rekan-rekan, saya ingin mengulang saja yang pertemuan dulu berdasarkan data yang ada di saya ini mudah-mudahan sih (tidak jelas) jadi tahun belanja nasional per tahun untuk obat saja Rp.70 triliun, sementara ditenggarai 30% bahkan ada yang bilan 35% itu obat itu palsu atau cap standar, itu kan nilainya kalau dikalkulasikan sudah 20an triliun, saya tidak tahu angka itu apakah benar atau tidak, jadi kalau hanya minta tambahan 143 miliar itu saya kira kecil sekali dibandingkan kepaluan-kepaluan yang harus dihadapi, jadi asli, tadi disebutkan mengerikan pengaruh dampak daripada obat-obat yang palsu dan standar itu masuk ke dalam badan kita begitu, jadi saya kira jangankan 143 miliar, kalau misalnya memang untuk memerangi kepaluan-kepaluan tadi saya Djon Rolindrawan dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat menyetujui, tadi rekan saya Pak Ali Taher menyebutkan di Jakarta saja tidak ada pengawasan, saya pikir saya saja yang berpendapat seperti itu karena banyak, saya juga pernah ke Pasar Pramuka, Pasar Kopro itu juga masih banyak saya tidak tahu apakah mereka punya ijin sebagai apotik atau toko obat misalnya obat apa namanya, mau ada razia katanya seperti itu, jadi saya tidak tahu mereka mengerti darimana begitu kalau razia kan harusnya *silent operation* tetapi ini sudah diketahui begitu, tadi 70 trilun itu hanya obat, belum lagi makanan dan kosmetik, jadi saya kira yang diawasi oleh Badan POM ini lebih dari 100 atau ratusan triliun menurut saya itu karena termasuk makanan, jadi mohon pengawasannya mungkin lebih efektif kalau anggaran untuk Tahun 2016 nanti mungkin juga bisa dibesarkan begitu dengan catatan tentu untuk memerangi kepaluan-kepaluan tadi yang mengakibatkan orang yang seharusnya tidak sakit menjadi sakit, orang beli tas palsu, dia tahu itu tas palsu karena mau mengirit tetapi kalau orang beli obat terus dapat yang palsu itu kan sangat mengerikan mungkin uangnya dapat meminjam atau seperti itu, jadi memang walaupun bisa dimasukkan ke Pasal-pasal di ngerti yang hukum itu hukuman buat dari mulai pabrikan sampai ke pengedar saya kira memang harus di hukum berat.

Demikian saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Pak Djon membahas soal kepaluan, jadi bukan korban kepaluan Pak Djon.

Silakan Anggota, Pak Ansory.

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc) :**

Terima kasih Pimpinan yang baik.

**Teman-teman Anggota Komisi IX DPR RI dan dari tamu kita Badan Kepala Badan POM dan jajaran semuanya.**

Langsung saja, mungkin langsung ke sosialisasi barangkali ya, karena cukup banyak sosialisasi di Badan POM ini begitu dimana harus kita tingkatkan sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi terhadap masyarakat ini dan juga sudah sering kita menemukannya di lapangan, sampai-sampai beberapa titik yang sudah pernah saya lakukan mungkin ada tiga titik, per titik saya undang 1000 orang di Dapil saya daerah pemilihan, bagaimana kita disitu adakan sosialisasi obat-obat berbahaya, bahan berbahaya mungkin bisa boraks, ada formalin pengawet-pengawet, ada juga (tidak jelas) banyak lagi yang lain-lain, begitu juga sosialisasi jas ya, jajanan anak sekolah, nah ini sangat-sangat perlu kita tingkatkan begitu, kalau perlu sosialisasi ini tidak ada satu kabupaten kota pun atau bahkan mungkin ke Camat karena Pimpinan melalui Pimpinan ini di beberapa negara Badan POM ini sudah jadi Kementerian, di beberapa negara Eropa sudah jadi Kementerian, saking pentingnya ini, *urgent* nya ini apalagi mungkin untuk di Jakarta, di Jakarta ini saya kira gorengan-gorengan yang ada di Jakarta itu pakai plastik dan kadang-kadang mereka tidak malu lagi ini plastik langsung diceburin ke kualitasnya biar garing, seharusnya pengawas dari Badan POM ini jadi yang kita makan plastik, kenapa dia garing itu plastik, coba ada punya alat khusus begitu, pura-pura saja langsung tangkap, kalau ketangkap begitu, walaupun sudah diberlakukan tetapi belum maksimal ke Sekolah-sekolah, begitu ada makanan-makanan zat-zat yang apa namanya dalam jangka 5, 6 tahun anak itu bisa *dead* begitu ya atau bisa stroke, jadi tolong ini Pak Kepala sosialisasi-sosialisasi yang kami lakukan ini kalau ditingkatkan dari yang sebelumnya, masih kurang. Berapat titik sebelumnya mungkin ya untuk Tahun 2015 ini minimal kalau bisa ditingkatkan, ditingkatkan saja, kalau pun tidak bisa mungkin tetap seperti kemarin, ya berapa titik yang, paling juga kalau umpamanya satu taruhlah dengan jumlah mungkin per kegiatan mungkin 200 digabung menjadi 2, 3 kegiatan kita bisa mengundang orang banyak. Mungkin dengan hitungan uang umpamanya 1 atau 1,5 miliar per Anggota baru 75 kok dari 1 triliun tadi, jadi tolong nanti kita tingkatkan kembali dalam sosialisasi ini begitu. Kalau perlu kita Pimpinan mengingat di lapangan ini sudah merupakan usulan kita barangkali apalagi di Kementerian, ini kenapa ada Badan POM ini banyak pengusaha-pengusaha yang tidak bertanggung jawab dan kita tahu siapa mungkin siapa pengusaha-pengusahanya ini begitu ya, tidak sayang dengan masyarakat, tidak sayang anak bangsa kita, jadi ini perlu ini sekali lagi tolong juga gerakan nasional waspada obat dan makanan ilegal, wah itu harus dikencangkan lagi itu, kalau itu harus mendunia Indonesia begitu, bahwa anak-anak memang kalau mungkin ada ini ya begitu ada dapat ini, anak-anak itu sebelum beli kalau sudah tersosialisasi ya, Pak ini apa, bahan dari apa Pak begitu ya sebelum beli makanannya, jadi sudah ada budaya menolak makanan-makanan itu begitu, itu vetsin-vetsin itu diotak itu kalau sudah di scan kelihatan putih-putih, lama-lama dia mati atau tidak berfungsi sehingga banyak sekarang penyakit-penyakit modern. Jadi itu tolong sosialisasi ini agar kita bisa sosialisasi lingkup provinsi, lingkup kabupaten juga itu tolong ditingkatkan begitu, itu saja Pimpinan barangkali sekedar menekankan, menguatkan saja agar sosialisasi-sosialisasi KEI yang ada di Badan POM ini tetap kita lakukan selanjutnya.

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Pak Ansory saya pikir apa yang disampaikan Pak Ansory selaku senior kami disini, ini kami sangat setuju sekali ya sosialisasi ini penting karena memang Badan POM ini berhadapan dengan industri obat dan makanan yang memang nilainya mungkin bisa mencapai ratusan triliun ya sementara sosialisasi yang Bapak lakukan memang masih diperlukan lebih banyak lagi.

Terakhir, saya berikan kesempatan masih ada?

Sesuai dengan komitmen tadi jam 3, saat ini tinggal 5 menit lagi, saya ijin kepada Anggota untuk kita perpanjang setengah 4?

**F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH., M.Hum) :**

Tambahan sedikit saja Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Tidak, waktunya dulu.

Setengah 4 ya?

Baik.

**(RAPAT : SETUJU)**

Silakan Pak Taher.

**F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH., M.Hum) :**

Saya lupa terburu-buru tadi, saya melihat BPOM pengadaan alat itu, alat ya supaya betul-betul kebutuhan, sesuai kebutuhan. Yang kedua, *after self services* nya, siapkan tenaganya kemudian sanksi antara penjual, pembeli dan juga tenaga ahlinya, ini penting sekali seperti halnya dengan Alkes kemarin saya bicara dengan Ibu Menteri supaya betul-betul diperhatikan, banyak temuan saya di Rumah Sakit itu alkes yang tidak bisa digunakan meskipun semangat belinya tinggi, semangat belinya tinggi, menggunakan tenaganya tidak siap, prosedurnya tidak diatur sehingga ya artinya itu yang terjadi, itu tambahannya supaya antara kebutuhan dengan (tidak jelas) perlu betul-betul juga dan pilihan merek, pilihan merek, saya dulu Wakil Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta itu ketika diundang ke Jerman oleh *hitachi* meskipun namanya *hitachi* tetapi pabriknya di Jerman, itu betul-betul sebelum barang itu dipesan 1 tahun sebelumnya itu program sudah mulai diinformasikan keunggulan-keunggulan dan kekurangannya, itu saya kira baik sekali untuk BPOM.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

**Bapak, Ibu yang saya hormati.**

Saya pikir semua sudah menggunakan hak bertanya dan di setengah jam terakhir ini kami berikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk menjawab, silakan.

**KEPALA BADAN POM RI (Dr. A. ROY SPARRINGGA, M.APP.Sc) :**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Beberapa pertanyaan nanti kolega kami apalagi tadi sosialisasi, rupanya Ibu Sestama sudah siap-siap.

Baik, Ibu Okky yang terhormat.

Tadi disampaikan mengapa hanya di Balai POM Sofifi dan Balai POM di Mamuju, itu adalah balai baru yang memang belum ada yang sekarang jadi balai, untuk yang Sofifi memang sudah ada posko dan itu sekarang menjadi balai tetapi tidak memungkinkan, maka itu perlu pembangunan infrastruktur laboratorium dan juga nanti mobil lab keliling bahkan di Sofifi kami berpikir lebih dari mobil lab keliling, mestinya juga ada kapal karena itu wilayahnya, *catchmen areanya* banyak kepulauan tetapi kembali lagi anggaran, masalahnya disana tetapi kita coba pikir lagi itu seharusnya kapal itu, rekrutmen dari pertama kami manfaatkan dari pos POM yang ada ditambah rekrutmen baru tetapi belum mencukupi kami juga memperoleh dari Balai POM sekitarnya yaitu di Manado, di Ambon dan di Gorontalo. Untuk yang di Sofifi kami meminta sedikit-sedikit sambil tahun depan kami meminta lagi moga-moga tidak ada moratorium, kalau moratorium ini masalah besar, kemudian juga kami bisa menggunakan anggota Pemda setempat untuk tenaga administratif, jadi itu yang kita optimalkan. Untuk Mamuju memang baru lahan ya jadi kami memang harus melakukan pembangunan ya, tanah sudah diperoleh tetapi pembangunan itu harus ada.

**F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M. Si) :**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Silakan.

**F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M. Si) :**

Baik Pak Kepala Badan, saya sudah paham, yang di Sofifi itu kan tadi Bapak katakan karena sudah ada pos kemudian diperbesarlah begitu ya, lebih direvitalisasi menjadi balai kan begitu, kalau saya baca disini kan Pos POM ini kan ada di beberapa daerah ya, ada Atambua, Tarakan, Bau-bau, Bima, kenapa Bapak pilih yang di Sofifi? Kenapa pilih pos yang disitu? Tidak di pos yang lain.

Terima kasih.

Terima kasih Pimpinan.

**KEPALA BADAN POM RI (Dr. A. ROY SPARRINGGA, M.APP.Sc) :**

Baik, ini provinsi baru di Maluku Utara, belum ada balai POMnya sehingga karena provinsi disana, ada pos POM jadi itu, jadi memang kami sudah berkordinasi dengan Bapak Gubernur semua akan dikembangkan di Sofifi Ibukota baru, jadi memang kalau dilihat penduduknya lebih banyak di pulau yang lain tetapi Bapak Gubernur semua dipusatkan disana sehingga pos POM yang lain yang di Ternate itu kami pertahankan, kami mempertahankan, karena penduduknya juga padat disana, tantangannya juga besar disana, jadi itu kondisi yang ada. Kemudian, kalau boleh kami lanjutkan mengenai aksi cepat sekaligus ada beberapa pertanyaan tentang pusat kewaspadaan ini sangat penting, mengapa ini penting? Sekaligus saya menyampaikan masalah obat, makanan sangat, amat sensitif di media sosial sedikit karena begitu cepat sekali, informasi di Malaysia cepat masuk ke Indonesia dan sebaliknya dan itu Badan POM karena kewenangannya bukannya tanpa batas, bukan tak terbatas memang ada keterbatasan, perlunya komunikasi, ada forum komunikasi yang lebih cair, jadi pusat kewaspadaan disini sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Taher, maaf tadi ini bukan lembaga tetapi sistem, ini adalah forum komunikasi cepat, kami menggunakan *resources* yang ada di Kementerian Lembaga, jadi kami simbolnya, badan POM khususnya untuk obat, makanan. Salah satu simpul di Kementerian Kesehatan, di Dinas-dinas adalah tentu mereka juga melakukan *survelence*, monitoring rutin tetapi datanya untuk apa itu, kita harus link tarik kalau itu terkait obat makanan, termasuk juga pusat kewaspadaan ini terkait dengan notifikasi produk Indonesia yang di ekspor ke luar negeri itu seringkali di notifikasi, akhirnya dimusnahkan, dikirim kembali bahkan menyebar masalah, ini harus kita kelola dengan baik, kita harus cepat sekali merespon banyak sekali produk makanan utamanya yang ditolak di Eropa sebagai salah satu contoh Pala, ini contoh saja, ini responnya lambat sekali, akhirnya apa? *Wah ini responnya lambat sekali, bagaimana*, ini *traceability system* belum ada, jadi kami harus membangun dengan Kementerian Pertanian, kami harus membangun *traceability system*, bagaimana petani pala tadi, lab kami bisa menggunakan balai POM di Manado kalau itu di daerah Sulawesi Utara dan kami siap juga bersama lintas sektor, ini sebagai salah satu contoh saja bahwa kita membangun sistem, memperkuat laboratorium tidak hanya di makanan, kita terus membangun, kemarin kami juga sudah mengundang lintas sektor di makanan tetapi bagaimana dengan obat tradisional, bagaimana dengan obat kosmetik, ini sekaligus pendekatan ini kami gunakan termasuk di dalam satu titik adalah lokal kompeten kontak poin dimana Pemerintah Daerah kalau sudah ke Dinas-dinas tidak ada *link*, jadi kami ingin memperkuat dengan INRASFF tadi kita akan perkuat tetapi bukan hanya makanan tetapi juga dengan yang lain, jadi itu membangun kesiapsiagaan kemudian kalau juga ada satu isu maka kita harus siap melakukan termasuk kita siapkan *expert-expert* tidak harus yang bicara itu Badan POM kalau itu berbicara tentu target-targetnya siapa, tentu narasumber-narasumber semua sama, persepsi masyarakat terus dibangun termasuk juga tentu dengan Anggota Dewan, bicara dengan

komunitas dan seterusnya, itu yang kita inginkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat tadi.

**F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M. Si) :**

Pimpinan, pendalaman sebentar.

**KETUA RAPAT :**

Ya Bu Okky.

**F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M. Si) :**

Terima kasih Pimpinan.

Saya tertarik pada ini Pak Kepala Badan, meningkatkan daya saing produk obat dan makanan nasional melalui respon cepat terhadap notifikasi penolakan produk ekspor, artinya agak teknis memang ketika sebuah katakanlah makanan begitu ya kemudian ditolak begitu maksudnya ya? Terus kerjanya ngapain ini pengawasan ini.

Terima kasih.

**KEPALA BADAN POM RI (Dr. A. ROY SPARRINGGA, M.APP.Sc) :**

Badan POM kebetulan sebagai *ness no contact point*, semua ini produk obat, makanan yang diluar itu selalu kontak Badan POM, kita sebagai *emergency contact point* contoh apel kemarin bukan ke Kementerian Pertanian tetapi ke Badan POM, kami menerima informasi-informasi itu kita sampaikan kepada kompeten kontak poin dalam hal ini karena itu buah segar ke pertanian (rekaman terputus) masih perlu perbaikan, kami kemarin sudah merapatkan dan terus kita bangun termasuk membuat laboratorium di pintu masuk, itu yang ingin kami bangun Ibu Okky ya termasuk nanti dengan Dinas-dinas, dengan komunikasi cepat.

Pertanyaannya apakah lintas sektor itu Satgas? Ya baik sekali. Ini salah satu nanti tergantung, kami membangun forum, kalau itu penegak hukum tadi Satgas penegakan hukum *criminal justice system* dimana ada Polri, ada Kejaksaan dan seterusnya Bea dan cukai, kami punya *link* itu tetapi tentu kami ingin lintas sektor itu berhubungan dengan masyarakat itu yang belum kita banyak sentuh, dalam hal ini tadi ada pertanyaan bagaimana sosialisasi? Disana ada juga kami akan siapkan Anggota Dewan juga bagaimana meningkatkan partisipasi publik, mengedukasi mereka, bagaimana mereka bisa menyampaikan haknya dan itu kita buat sistem laporan dan seterusnya dan Kader-kader bisa kita lakukan memfasilitasi kader-kader, bagaimana menjadi konsumen yang kritis melaporkan dan sebagainya, itu yang ingin kami perkuat, itu salah satunya. Tentu ada *gain*, (*tidak jelas*) dan sebagainya itu terus kita bisa kita integrasikan dalam hal ini, bagaimana menghadapi obat-obat yang palsu sub standar, mengedukasi konsumen, jangan membeli di tempat yang tentu tidak resmi itu salah satu tipnya, murah itu harus diperhatikan bahaya *clu-clunya* itu jadi seperti itu *leading* sektor badan POM, untuk obat

makanan iya tetapi karena kewenangannya ada di Kementerian Lembaga lain nah itu kami harus memperkuat kordinasi ini, ini salah satu instrumen untuk memperkuat tadi kordinasi komunikasi itu. Sejauh ini cukup bagus respon dari Kementerian Lembaga dan walaupun awalnya resisten dengan Badan POM, kalau bicara pangan saat ini *alhamdulillah* Badan POM diberikan kesempatan untuk *take a leap* sementara ini cukup bagus suasananya. Komunikasi resiko tentu yang tadi itu sangat penting bahwa persepsi masyarakat berbeda dengan persepsi kita harus kita *gap* nya harus kita persempit maka itu memang kita membutuhkan.

Sebelum saya melanjutkan ke Pak Ketut, saya harus menyampaikan Bapak Pimpinan mengenai coklat tadi, mohon maaf saya lupa menyampaikan hari ini kami sudah memanggil produk coklat yang dimaksud dan ternyata mereka tidak buat program tersebut, sedang kita telusuri siapa yang membuat itu dan hari ini Direktur Inspeksi Sertifikasi, ini ada buktinya sudah memanggil pelaku usahanya dan surat edaran sudah dikirim ke seluruh Balai Besar Balai POM di seluruh Indonesia, jadi kami punya Balai Besar Balai POM kami sudah instruksikan pada mereka untuk melakukan pengawasan yang sensitif tadi, kami segera yang contoh kopi yang kemarin kami cepat-cepat menyampaikan mengapa kopi sachet yang kemarin, saya dikejar oleh Metro TV ya ini sebagai contoh *white coffee* kemudian kebetulan saya kenal yang bicara itu saya kontak, ini perlunya dicari saya hubungi Persatuan Ahli Pangan Indonesia dimana saya pembinanya, *siapa ini anggotanya? Oh Pak Subagyo Pak*, mana nomer teleponnya, saya telepon *apa benar Bapak bicara itu? Ah sebenarnya tidak seperti itu, bla, bla*, ini contoh perlunya pusat kewaspadaan, satu sumber masyarakat jangan dibiarkan bimbang, ini menghantam industri kita, itu sebenarnya Beliau adalah *concern* dengan *trans fat* bukan kopinya, di dalam *trans fat* ini sebetulnya kalau kita bicara kembali lagi edukasi kepada konsumen, kita harus membatasi memang gula, garam, lemak, tidak semua lemak sebenarnya, lemak yang dimaksud adalah lemak jenuh dan *trans fat*, *trans fat* itu apa? *trans fat* itu meningkatkan konsistensi biasanya ada di mentega, margarin supaya padat, meningkatkan *melting poin*, jadi ada proses hidrogenasi, mohon maaf terlalu teknis saya dan itu ...

#### **KETUA RAPAT :**

Tidak apa-apa Pak, soal kopi ini kita baru tahu.

#### **KEPALA BADAN POM RI (Dr. A. ROY SPARRINGGA, M.APP.Sc) :**

Ya ini kami berkomunikasi langsung kepada Profesor Ahmad Subagyo namanya kebetulan di Jember, *Bapak hati-hati bicara diruang publik, sangat sensitif, ya Pak, kami concern trans fat, ya trans fat* aturannya sebagaimana di Badan POM (*tidak jelas*) kalau di beberapa negara ada Amerika, Kanada itu mandatori disebutkan *trans fatnya* berapa, di Kodex belum tetapi di Indonesia sudah (*tidak jelas*), diklaim bebas trans fat apabila 1,5 gram per 100 gram ini contoh saja, trans fat rendah kalau 5 gram per 100 gram, ini sudah ada aturan kami tetapi ke depan edukasi kepada konsumen menjadi penting, kita pakai makan mentega banyak sekali pagi memang perlu dibatasi bukan kopi dan sebagainya ini harus



hati-hati. Kopi juga jangan lebih dari 3 cup per hari karena melebihi 150 mg tidak baik buat jantung mohon maaf.

**F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M. Si) :**

Pimpinan, boleh?

**KETUA RAPAT :**

Silakan.

**F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M. Si) :**

Terima kasih Pak Kepala Badan.

Ini kan memang banyak diluar sana makanan, obat dan memang berbahaya buat konsumen dan di presentasi Bapak beberapa waktu yang lalu di ruang Komisi IX DPR RI Bapak menyebutkan satgas pengendalian obat dan makanan ya, nah kalau ada hal-hal seperti itu entah kopi dan lain sebagainya atau *white coffee* itu, saya bayangkan kalau satgas ini bekerja dengan baik ada Jaksa, ada Polisi, artinya kan bisa memberikan *law enforcement* kepada produsennya begitu Pak.

Mohon penjelasannya.

Terima kasih.

**KEPALA BADAN POM RI (Dr. A. ROY SPARRINGGA, M.APP.Sc) :**

Mohon maaf untuk kasus kopi bukan salah pelaku usaha, semua yang punya izin edar itu sudah melalui *trade market* kami tetapi edukasi masyarakat bagaimana memilih makanan untuk mereka harus bijaksana dan ini edukasi ada *gap* disana Bu, memang perlu edukasi masyarakat, jadi memang di Indonesia masih lemah dan perlu terus kita edukasi apalagi penyakit tidak menular terus meningkat, ini keprihatinan kita dan pentingnya edukasi kepada konsumen dalam hal ini Bu, seperti halnya garam, gula lemak harus dibatasi tetapi tidak mungkin kita melarang seseorang jangan banyak makan gula dan sebagainya, karena gula kalau berlebih memang berbahaya buat mereka sendiri, kira-kira demikian. Ini adalah masalah global saat ini, maka itu kita ada program level gula garam lemak di Permenkes No.33 kalau tidak salah itu menjadi salah satu juga nanti ke depan.

Saya bisa lanjut?

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ibu Okky cukup ya?

Oke, baik.

Silakan Pak dilanjut.

## **KEPALA BADAN POM RI (Dr. A. ROY SPARRINGGA, M.APP.Sc) :**

Pak Ketut, terima kasih masukannya dan meningkatkan 10 Pos POM, 2 Balai POM, kenapa 2 balai POM tadi sudah terjawab Pak ya, jadi memang Pos POM ini didirikan tidak hanya untuk di daerah perbatasan, kriterianya juga yang tidak terjangkau oleh ibukota dimana provinsi di Balai POM itu ada, apalagi ada pemekaran kalau sudah di daerah administratif baru itu menyulitkan, akhirnya mereka tidak akan masuk itu di provinsi baru, ini ada kevakuman, maka perlu ada Pos POM, Kalimantan Utara mengapa sekaligus menjawab tadi kenapa ada Tarakan, Bapak siapa tadi ada di catatan Tarakan karena itu untuk Kalimantan Utara, sekarang berbicara dengan Pemerintah Daerah, nanti kami tidak di Tarakan, nanti di Bulungan lagi, permasalahan lagi, ini sedang kita diskusikan.

Berikutnya, adalah Balai POM di Kalimantan Utara yang belum kita putuskan mungkin di Bulungan tetapi Pos POM di Tarakan akan tetap karena penduduk banyak disana. Saya sependapat dengan Bapak bagaimana kita bicara sangat kontroversial di kota saja kita belum sepenuhnya ini benar sekali, kami memahami kalau bicara soal sekolah dasar saja ada 180.000 sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah, saat ini tahun terakhir kita baru masuk ke 13000 saja, baru 13% saja jadi hanya 23.000 mohon maaf itu 13%, bagaimana dengan sekolah dasar yang lain, maka ini sebagai salah satu contoh ilustrasi kami, kami akan lebih mengoptimalkan anggaran dengan membentuk kader-kader, kami kerja sama kemitraan dengan Pemda, kemudian juga dengan Pemda dan Perguruan Tinggi di daerah, setelah kami komunikasi mereka siap melakukan fasilitasi Mahasiswa-mahasiswa mereka untuk ikut serta menjadi kader memfasilitasi termasuk kalau di Sekolah-sekolah Dasar kita siap dengan komite sekolah orang tuanya kita didik mereka dan mereka akan menjadi kader di sekolah, ini sebagai satu contoh terobosan kami, tentu kami akan renovasi termasuk pasar-pasar itu menjadi perhatian kami, kerja sama dengan pemerintah daerah ini penting sekali dan besok insyAllah kami akan menandatangani MoU dengan Jakarta, Bapak Gubernur dan kami akan segera menandatangani kerja sama, ini sebagai contoh barometer Indonesia kalau bisa kita melakukan program-program terobosan di Jakarta, kita tunggu saja nanti.

Kalau kita bicara banjir, mestinya kita mengantisipasi, kira-kira ikutan banjir penyakit apa *food borne diseases* dan itu pusat kewaspadaan harus siap, itu yang kami maksudkan kesiapsiagaan *preparedness*. Ibu Siti, terima kasih tadi. Fungsinya Badan POM dengan Balai oh maaf Pos POM apa, kami luruskan 33 itu bukan balai besar saja, sebagian juga ada balai kecil, balai kita sebutkan hanya 16 mungkin balai besar, 19 ternyata balai besar, lainnya balai. Ini juga ada masalah, karena dianggap UPT sehingga eselonnya 3, kami minta Kemenpan tidak bisa aturannya memang eselonnya 3, kalau bicara dengan Pemda eselon 3 kadang-kadang tidak dianggap, ini juga masalahnya itu, tetapi tidak apa-apa saya terus membesarkan kolega kami jangan berpikir eselon yang penting kita melindungi masyarakat, tadi kesempatan tadi pagi juga merespon Bapak waktu yang lalu bahwa tanggung jawab siapa ini industri rumah tangga pangan, walaupun kewenangannya bukan Badan POM kami memerintahkan tadi Kepala Balai Besar POM tidak boleh mengatakan itu

bukan kewenangan balai, jadi kami harus siap negara harus hadir, jadi harus siap menyampaikan ya bersama-sama nanti dengan Pemerintah Daerah. Jadi, maaf bicara Pos POM, Pos POM ini seperti tadi kami sampaikan ini memang di daerah yang tidak terjangkau dari Balai POM terlalu jauh Bu, sehingga karakternya di perbatasan bisa juga di daerah *remote area* dan itu menjadi bagian pentingnya wilayah yang secara geografis mempunyai jangkauan yang cukup luas tetapi kita kepulauan dan sebagainya akan sulit wilayah perbatasan negara, daerah yang sulit terjangkau, wilayah administrasi, provinsi baru, pelabuhan atau bandar udara, itu kira-kira. Kemudian....

**F-PKB (Dra. Hj. SITI MASRIFAH, MA) :**

Fungsinya sama dengan balai besar atau balai kecil?

**KEPALA BADAN POM RI (Dr. A. ROY SPARRINGGA, M.APP.Sc) :**

Sama tetapi karena kapasitasnya terbatas, tentu hanya yang basic saja, karena tidak ada laboratorium yang mendukung jadi sangat basic disana tetapi beberapa sudah ada laboratorium lab klinik tidak semuanya, hanya beberapa saja. Nah, pusat kewaspadaan tadi sudah saya sampaikan jadi saya tidak akan mengulangi lagi, ini justru kita ingin mengefektifkan kerja *resources* Kementerian Lembaga yang ada termasuk kami, jadi itu sistem kemudian forum komunikasi bagaimana merespon cepat tentang pengawasan obat, makanan termasuk menangani, mengendalikan, mengkomunikasikan kemudian stabilisasi pasokan ini penting karena satu isu kalau kita tidak segera manage itu akan menyebabkan kegoncangan.

Pak Ayub, terima kasih dari Jember, isteri saya dari Jember Pak. Terima kasih Pak Ayub. Pusat kewaspadaan ini sangat penting tadi memang betul bagaimana kalau kita bicara obat tradisional Cilacap apakah itu sudah dalam kondisi darurat? Nah, ini yang Bapak sampaikan benar Pak, sebetulnya kalau kita bicara resiko itu obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat itu sudah darurat, kita harus tangani, tidak bisa dibiarkan, jadi kembali lagi kita berbasis resiko kita akan *mapping* data-data yang ada termasuk bagaimana respon masyarakat menghadapi suatu isu, kadang-kadang isu itu tidak bermasalah tetapi masyarakat sangat amat sebagai *outreach*, menjadi *concern* mereka kita harus kendalikan, definisinya adalah kalau kita tidak kendalikan suatu isu itu akan menjadi bencana yang terus tidak terkendali itu yang tadi pertanyaan yang tadi apa maksud dari misi darurat tadi.

Terima kasih.

Ibu Siti Mufattahah, kok kecil? Kita juga ingin besar, kalau ditanya siapa yang salah, mungkin ini pertanyaan yang bagus, bisa saja Badan POM yang belum bisa menyakinkan, jujur saja kami bisa menyampaikan seperti itu kami siap ada program-program yang *embrio* bisa besar, sebagai salah satu contoh adalah gerakan program keamanan pangan di desa *food safety* masuk desa, memang belum banyak baru 100 desa, kami kerja sama memang fokus kepada desa wisata, Desa-desa yang punya potensi ekonomi, daerah industri, kenapa? Kita ingin mengembangkan

Pusat-pusat ekonomi baru di desa tersebut, ini program baru kita, desa wisata salah satu di Yogyakarta dan nanti ada beberapa, itu yang ingin kami lihat bisa menjadi contoh replikasi, kalau berhasil kami minta nanti dukungan seperti apa dan itu mungkin bisa menjadi besar, kami akan kerja sama lintas sektor juga Kementerian Lembaga yang lain. Baik, ini *feedback* buat kami, kami akan optimalkan tetapi akan berpikir besar, berpikir strategis, mengapa tidak dari dulu? Ya itu kami akan sekarang berpikir kesana saja, tim kami memang orang-orang kami orang teknis semua ya, kalau berpikir detail begitu yang kecil-kecil tetapi saya percaya diantara ini kami akan fokus kepada yang strategis yang saya setuju dengan pendapat tadi.

Pak Ali, sudah kepastian, ya terima kasih dukungan kepada Badan POM, beberapa sebetulnya sudah saya jawab bahwa pusat kewaspadaan ini bukan lembaga baru, bukan kita membentuk ada bangunan seperti itu, justru kita membangun sistem, membangun forum komunikasi dan *meleverage resources* yang kita miliki di Kementerian Lembaga termasuk dalam rangka tadi, globalisasi produk ekspor kita ditolak, termasuk produk impor ke Indonesia, selama ini kita kurang dalam tanda petik cerewet, notifikasi kita harus lebih kritis di pintu masuk, termasuk kita akan lebih lihat situasi dan kita juga bisa langsung menolak produk-produk yang masuk ke Indonesia termasuk juga produk-produk ilegal tadi. Kemudian, daerah ya Beliau tahu Pos POM-Pos POM mana saja yang lebih dibutuhkan, tadi sudah dijawab mengapa Tarakan? Karena itu daerah Provinsi baru, kemudian tingkatkan efisiensi, efektivitas, terima kasih dan mengenai hal-hal saya ingin kembali sampaikan disini walaupun yang lalu sudah kami jawab sebenarnya, kerja sama kami dengan MUI sangat baik sekali, kenapa? Karena kami sudah punya piagam kerja sama sejak tahun 1996, jadi piagam kerja sama MUI, waktu itu Departemen Agama dan Departemen Kesehatan dimana Badan POM masih Direktorat Jenderal POM, bagaimana kita bagi sertifikasi dan labelisasi halal. Badan POM bisa memberikan ijin pencantuman halal itu dari Badan POM sejauh ada (*rekaman terputus*), 2013 tentang kerja sama pencantuman keterangan halal pada label pangan olahan, jadi sangat baik sekarang kami saat ini memang cukup bagus kerja samanya yang Toyiban adalah Badan POM, yang halal itu MUI, MUI memberikan sertifikat halal fatwa MUI tersebut, juga mendengarkan informasi bagaimana apakah Toyib dalam cara produksi makanan yang baik.

Kami lanjutkan dengan iya terima kasih dengan MU Muhammadiyah tentu, terus kami akan lakukan komunikasi dengan baik kebutuhan kita pengadaan alat, harus memikirkan *after self service* terima kasih untuk masuk orang-orangnya, terima kasih kebetulan Pak Djoni terima kasih atas dukungan *concern* Bapak bahwa kalau kita bicara obat palsu dan sub standar 30%, kami ingin meluruskan beberapa merek yang tadi 30% merek tertentu Pak yang sering dipalsukan, memang ada merek tertentu yang dipalsukan contohnya yang obat kuat, saya tidak bisa menyebutkan. Mengenai pasar pramuka, tentu kewenangan Badan POM berkali-kali kami sampaikan keterbatasan kami walaupun satu sarana kita merekomendasikan ditutup Badan POM tidak punya kewenangan untuk menutup itu, kita juga sudah sering bicara tetapi nanti coba kita diskusi dengan Pemerintah Daerah, ijin sarana distribusi termasuk disana ada

apotik rakyat disana, hak penyidikan, penyidik memang kami kembali lagi kami bisa menarik ijin edar tetapi konteks ini tentu berbeda, contohnya obat keras itu tidak salah tetapi kalau dijual kepada sarana yang tidak berhak bermasalah, jadi distribusinya yang apa, sarana pelayanan kefarmasiannya yang perlu kita lakukan tindakan, seperti itu kira-kira Pak.

**KETUA RAPAT :**

Pak Djoni cukup yang warna Biru tadi?

**KEPALA BADAN POM RI (Dr. A. ROY SPARRINGGA, M.APP.Sc) :**

Kemudian, penjualan pil biru di pinggir-pinggir jalan itu sarananya ilegal dan produknya ilegal, itu menjadi obyek Polri Pak, jadi Badan POM akhirnya sering ngajak kami itu penyidik Polri tetapi kami siap saja, kami sering menjadikan keterangan ahli untuk itu.

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc) :**

Tambahan dikit saja Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Ansory.

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc) :**

Mungkin ini diluar anggaran, tetapi ini tambahan saja bahwa yang dari Cina itu buah-buahan seperti jeruk itu disana sudah 2-3 tahun baru dikirim ke kita, tolong agak ketat pengecekannya itu baik di Batam, Tanjung Balai juga Pelabuhan-pelabuhan tegas lainnya begitu ya. Kemudian yang kedua, di Jerman itu ada beberapa daging-daging sisa yang dikirim ke Indonesia itu di Jerman kadang-kadang sudah busuk dicampur dengan yang lain dan dikirim ke Indonesia dan pernah juga lolos begitu. Coba petugas lapangan ini sehingga kalau sudah busuk dijadikan bakso tidak ketahuan lagi begitu, ini perlu pengawasan ketat untuk dua hal macam itu dan kalau mau dianggarkan ada alat-alat yang canggih itu beli saja mungkin bisa untuk Tahun 2016 nanti di setiap pelabuhan ya, walaupun kita pintar tetapi penipu ini lebih pintar, kita harus ketat disitu.

Terima kasih Pimpinan.

**KEPALA BADAN POM RI (Dr. A. ROY SPARRINGGA, M.APP.Sc) :**

Baik, terima kasih.

Ijin langsung menjawab.

Pak Ansory, terima kasih banyak atas masukkannya, saya merespon bahwa sosialisasi nanti biar Ibu Sestama akan menyampaikan di pusat kewaspadaan tadi itu juga ada anggaran untuk itu, ya partisipasi publik edukasi kepada konsumen tentang masukkan Bapak di Batam, kami punya jejaring pengawasan pangan di daerah, kita angkat walaupun bukan

kewenangan Badan POM untuk buah atau daging segar dan sebagainya, kami akan mengangkat isu ini ke pusat karena kami sebagai kordinator berbicara mengenai keamanan pangan dan juga jejaring pengaman pangan di daerah. Mengenai petugas kami di pelabuhan, mohon maaf kami harus luruskan hanya ada 3 yaitu karantina, bea dan cukai dan imigrasi, tadi kami sudah bicara dengan Dirjen Bea dan Cukai mereka siap sewaktu-waktu kalau Badan POM mau masuk ya silakan masuk, jadi hubungan kami dengan bea dan cukai memungkinkan kalau ada kecurigaan kita akan langsung kesana, kami akan mengoptimalkan pengawasan kami, terima kasih untuk itu.

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc) :**

Melalui Pimpinan.

Jangan lagi terjadi seperti di Tanjung Priok karena petugas melempem, karena yang dilawan itu bintang-bintang sehingga lolos dia, begitu lolos tahu-tahunya di kontainer itu narkoba, jangan sampai terjadi lagi. Jadi, Bapak mempertaruhkan kredibilitas begitu.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Silakan dilanjut lagi Pimpinan.

**KEPALA BADAN POM RI (Dr. A. ROY SPARRINGA, M.APP.Sc) :**

Baik Pak Ansory.

Penyidik pegawai negeri kami yang 500 memang seringkali berhadapan dengan kehilangan nyawa dan beberapa sering harus fisik berantem dan itu sudah sering harus fisik berantem itu sudah sering terjadi tulangnya sampai patah dan sebagainya, itu sudah sering terjadi dan kami maaf ini di Medan, anggota kami di Medan dan kebetulan kami sering sekali berhadapan dengan situasi yang amat sangat genting. Mengenai pelabuhan walaupun kami tidak bisa masuk, kami melakukan lebih pro aktif yaitu kita buntuti sampai ke gudangnya dan itu sudah jadi SOP kami walaupun tidak ada kewenangan di pelabuhan, kenapa? Karena walaupun kita bongkar di Pelabuhan akan berhenti itu, akan ramai lagi, lama lagi dan itu Bea dan cukai tidak melakukan seperti itu sehingga sudah keluar baru kita lakukan dan itu SOP kita juga.

Baik, yang terakhir mungkin ijin Bapak Pimpinan Ibu Sestama mau menyampaikan tambahan.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Bu.

**SESTAMA BADAN POM RI :**

Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang.

Menanggapi pemaparan dari Bapak Kepala Badan, terima kasih juga untuk masukan dan arahan dari yang terhormat Anggota Dewan untuk penguatan terhadap program pemberdayaan konsumen atau pun masyarakat. Jadi, terkait dengan APBNP ada tiga tujuan, pertama, adalah penguatan sistem yang tentu perlu didukung dengan penguatan infrastruktur yang merupakan program kedua, kemudian tujuan yang ketiga adalah program pemberdayaan konsumen untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap produk obat dan makanan yang beresiko tinggi. Di Tahun 2015 kami sudah mengalokasikan kegiatan untuk pemberdayaan konsumen sesuai dengan periode yang sebelumnya Pak, saya tadi juga masukan dan harapan dari Pak Ansory, jadi untuk kegiatan KEI sudah kami alokasikan sesuai dengan kondisi tahun lalu. Jadi ada yang terkait langsung, dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat atau pun juga melalui kegiatan Talk Show, Pameran ILM seperti itu Pak.

**F-HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE., M.MAR,MBA) :**

Pimpinan sedikit.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Djoni.

**F-HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE., M.MAR,MBA) :**

Kalau dimungkinkan Badan POM mengundang Tenaga-tenaga ahli kami begitu untuk mendapatkan arahan mekanismenya seperti apa, jadi supaya kita salah itu karena nanti kami disini ada 48 nanti *oh ini yang mengetahui lebih baik jadi dapat duluan lebih banyak*, supaya tidak terjadi seperti itu.

Demikian.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Tenang saja, nanti melalui Pimpinan Pak Djoni.  
Silakan Bu.

**SESTAMA BADAN POM :**

Jadi, nanti kita tindaklanjuti Pak koordinasi komunikasi sebagaimana selama ini juga di Tahun 2014 sudah berjalan dengan harmonis.

**F-GERINDRA (KHAIDIR) :**

Pimpinan, ijin sedikit.

Sebelum sampai pada kesimpulan langsung dengan Ibu Sekretaris, kalau pengalaman tahun lalu katanya Bu itu baru dilaksanakan pada saat masa jabatan Anggota itu di tahun ke-5, tetapi kalau memungkinkan kita

mulai dari tahun pertama Bu sampai tahun ke-5, kalau dulu posnya 1 ini ditambah 2. Saya kira demikian.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ya makanya anggarannya diminta ini.

Pak Kepala Badan sudah, Ibu sudah?

Baik, Bapak/Ibu yang kami hormati, kita sudah mendengar paparan jawaban dari Kepala Badan dan sesuai dengan jadwal saya minta ijin karena untuk membaca kesimpulan, saya perpanjang sampai jam 4 bisa disetujui?

**(RAPAT : SETUJU)**

Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan dan perlu kami sampaikan kepada Kepala Badan rencana RUU yang kami masukkan kesediaan farmasi, alat kesehatan dan pengawasan itu ternyata belum mendapat tanggapan dari Komisi VI DPR RI karena ada hubungannya dengan industri katanya dan juga dari Pemerintah juga belum siap sehingga itu tidak masuk di Baleg Pak untuk Tahun 2015, jadi mungkin untuk Tahun 2016 kita akan kembalikan masuk...

**F-PKS (Drs. H. CHAIRUL ANWAR, Apt.) :**

Pak Ketua,

**KETUA RAPAT :**

Oh ya silakan Baleg Pak ya?

**F-PKS (Drs. H. CHAIRUL ANWAR, Apt.) :**

Yang masalah undang-undang, tadi kita coba bincang-bincang dengan Anggota yang lama itu, jadi kalau bisa itu undang-undangnya bunyinya jangan begitu Pak, supaya dia tidak terkait dengan komisi lain, langsung saja Undang-undang Badan POM, Pengawasan Obat dan Makanan maksudnya begitu. Jadi, dia tidak terkait dengan komisi lain.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Sebenarnya di RUU Ketersediaan Farmasi, alat kesehatan dan seterusnya kita sudah perdebatkan panjang sejak dulu Pak ya? Awalnya adalah pengawasan, namun kemudian menjadi kesediaan, nah tentu kami disini semua sepakat bila Badan POM ini harus memiliki satu power dalam memberikan sanksi dan sebagainya, memang harus ada Undang-undang Kepengawasan tetapi yang kemarin memang itu kita di drop. Oleh karena itu, mungkin dalam ke depannya silakan dari Pemerintah mengajukan kembali yang nanti akan dibahas di Komisi dan kalau bisa ya *stike* di



Komisi IX DPR RI, jangan sampai ke Komisi yang lainnya, jangan sampai Pansus, begitu ya sementara Pak ya untuk masalah RUU dan saya minta ijin kepada Teman-teman untuk membacakan draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan :

1. Komisi IX DPR RI dapat memahami bahwa alokasi anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI pada APBN Anggaran Tahun 2015 adalah sebesar Rp.1.221.594.280.000,- (*Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) ini adalah anggaran yang sudah ditetapkan tahun lalu.
2. Komisi IX DPR RI akan mengkaji usulan program dan kegiatan Badan POM RI dalam RAPBNP Tahun Anggaran 2015 yang akan diusulkan dalam Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.143.750.000,- (*Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), kenapa kita mengkaji? Karena kita tidak punya waktu untuk mengkaji dalam satu hari sisa ini Pak ya, karena kami baru mendapat, jadi kita akan mengkaji agar dimasukkan dalam Tahun Anggaran 2016.
  - a. Adalah untuk upaya pengurangan dampak globalisasi melalui pembentukan pusat kewaspadaan dan penanggulangan permasalahan obat dan makanan sebesar Rp.81.750.000,- (*Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
  - b. Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama di kawasan timur Indonesia, daerah perbatasan sebesar Rp.62.000.000,- (*Enam Puluh Dua Miliar Rupiah*).
3. Komisi IX DPR RI meminta kepada Badan POM RI untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui penajaman program kegiatan dengan memperhatikan aspirasi daerah sebagai bentuk pelaksanaan representasi Anggota DPR RI.

Sampai sini saya meminta masukkan dari Kawan-kawan.

**F-PKS (Drs. H. CHAIRUL ANWAR, Apt.) :**

Pak Ketua, jadi dalam pembahasan Banggar ini kan masuk dalam belanja pusat Pak, kebetulan Badan POM tidak memasukkan tambahan, tetapi tidak ada Pak di belanja pusatnya Departemen Keuangan itu tidak ada termasuk Kementerian Kesehatan jatah yang kemarin saja tidak ada. Di nokta keuangan pemerintah pun tidak ada, jadi nanti malam itu sudah mengundang Menteri Keuangan, jadi sudah diketok.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak.

**KEPALA BADAN POM RI (Dr. A. ROY SPARRINGA, M.APP.Sc) :**

Mohon ijin.

Memang kami memperoleh surat dari Kementerian Keuangan itu akhir Desember, kita memasukkan itu program prioritas yang tentu yang ini, kami sejauh ini tidak tahu bahwa itu tidak masuk di nota keuangan tetapi informasi dari Kawan-kawan itu sedang dikaji disana. Mohon maaf kalau itu tidak bagaimana Ibu Sestama dan salah satu yang tadi program sosialisasi itu justru di APBNP pusat kewaspadaan, jadi itu mohon maaf kami harus luruskan seperti itu.

**F-PKS (Drs. H. CHAIRUL ANWAR, Apt.) :**

Dapat tidak suratnya dari Kementerian Keuangan ada APBNPnya?

**SESTAMA BADAN POM :**

Jadi, respon dari Kemenkeunya belum ada, kami baru menyampaikan sesuai waktu itu ada surat edaran untuk pengajuan APBNPnya.

**F-PKS (Drs. H. CHAIRUL ANWAR, Apt.) :**

Berarti begini saja Pak Ketua, ini kan pembahasan tentang belanja pusat Kementerian dan Lembaga itu kan sudah 2 hari yang lalu Pak Ketua dan itu sudah semacam sudah diketoklah walaupun diketok sementara dan disitu kayaknya tidak tampak, *wallahualam* nanti kalau ada perubahan di terakhir-terakhir saya tidak tahu ya, mudah-mudahan ada itu. Cuma terkait dengan ini Pak Ketua kalau dia dimasukkan ke Tahun 2016 itu terlalu kecil, jadi entah bagaimana kalimatnya yang bagus.

**F-PKB (Dra. Hj. SITI MASRIFAH, MA) :**

Maaf Ketua, interupsi.

Saya usul ini tetap karena akan kita dorong, maksudnya kan masih ada waktu semalam itu, kita dorong ini tetap di Tahun 2015 siapa tahu di nota terakhirnya masih bisa di detik-detik terakhirnya, saya kira begitu, jangan dimasukkan di Tahun 2016.

**KETUA RAPAT :**

Oke, ada Kawan-kawan Banggar disini siapa lagi selain Pak Chairul? Sedang rapat ya. Jadi, begini bagaimana jika bahwa usulan ini tetap kita masukkan tahun ini dan pembahasannya tetap, jadi artinya kalau tidak masuk tahun ini memang kita akan bahas kembali dengan kita membahas anggaran yang diluar ini, artinya mungkin tadi usulan pengawasan desa saya pikir itu bagus sekali, Desa-desa wisata saya pikir bagus sekali, ini kan karena masalah waktu yang mepet sekali jadi poin kedua itu adalah Komisi IX DPR RI itu akan mengkaji dan mendukung usulan program kegiatan Badan POM di RAPBNP...

**F-PKS (Drs. H. CHAIRUL ANWAR, Apt.) :**

Mengkaji dihilangkan.

**KETUA RAPAT :**

Ya akan mendukung atau akannya dihilangkan saja, langsung Komisi IX DPR RI mendukung Badan POM sebesar sekian ya betul, yaitu adalah upaya pengurangan sekian-sekian. Nah, yang poin ketiga ini bunyinya adalah bahwa *apabila di dalam RAPBNP ini dirasa, maka Komisi IX DPR RI akan*, coba ini kalimatnya buat Badan Anggaran mungkin lebih paham karena ini perjuangannya hanya malam hari ini Pak Chairul. Jadi, Pak Kepala Badan saya pikir silakan nanti Sestama segera, ini poinnya kita setuju ya? Poin ini kita setuju harus segera bergerak malam ini artinya silakan dengan Banggar yang saat ini sedang rapat tetapi poin utamanya adalah Komisi IX DPR RI jika kita tidak dapat kita akan melanjutkannya di dalam Tahun Anggaran 2016 dengan pembahasan yang lebih mendalam kira-kira begitu.

**F-PKS (Drs. H. CHAIRUL ANWAR, Apt.) :**

Pak Ketua, mungkin kalau yang Tahun 2016 nya tidak usah ditulis disini, kita kan sama-sama sepakat jadi tidak usah ditulis Pak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Baik, jadi cukup sampai yang barusan saja menyetujui ya? Oke, poin ketiga saya pikir tidak ada masalah ya karena kita berbicara soal pengembangan daerah pemilihan juga. Baik, mari kita simak lagi, poin satu adalah Komisi IX DPR RI memahami bahwa alokasi anggaran saat ini adalah sebesar Rp.1.221.594.280.000,- (*Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) dan Komisi IX DPR RI mendukung atau menyetujui? Silakan, mendukung atau menyetujui, kalau menyetujui kita harus kirim ke Banggar ini, coba saya tanya menyetujui tidak? Teman-teman? Saya tanyanya ke Komisi dulu Bu, ini majelis taklim cepat banget. Bisa disetujui ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

Baik, jadi menyetujui usulan program dan kegiatan Badan POM dalam RAPBNP Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.143.750.000,- (*Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut yaitu upaya pengurangan dampak globalisasi melalui pemenuhan pusat kewaspadaan dan penanggulangan permasalahan obat dan makanan sebesar Rp.81.750.000.000 (*Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dan pemerataan pembangunan antar wilayah terutama di kawasan timur Indonesia, daerah perbatasan sebesar Rp.62.000.000,- (*Enam Puluh Dua Miliar Rupiah*), Komisi IX DPR RI meminta kepada Kepala Badan POM untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui penajaman program kegiatan dengan memperhatikan aspirasi daerah sebagai bentuk pelaksanaan representasi Anggota DPR RI.

Sampai ini apakah Anggota sepakat? Sepakat ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

Baik.

Jadi, setelah ini maka Pimpinan akan menulis surat kepada Banggar untuk ini ditindaklanjuti, setelah itu kami meminta Kawan-kawan di Banggar mungkin untuk bisa memperjuangkannya dan Pak Kepala Badan POM mungkin perlu dipahami ini perjalanan menuju ke Banggar agak macet dan banjir, jadi mungkin perjalanannya pasti berat ya Pak.

Baik, silakan dari Pemerintah.

**KEPALA BADAN POM RI (Dr. A. ROY SPARRINGA, M.APP.Sc) :**

Terima kasih banyak, luar biasa kami sangat menghargai diskusi yang sangat amat baik, kondusif dan terlihat dukungann dari Komisi IX DPR RI dan kami senang sekali dan terus akan bekerja lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Bapak Pimpinan, Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI yang semakin baik dan kami senang sekali menjadi mitra kerja.

Terima kasih banyak.

**KETUA RAPAT :**

**Pak Kepala Badan beserta jajarannya.**

Pada dasarnya kita mensepakati, menyetujui anggaran yang sudah ada, itu tentu dengan catatan apa yang diharapkan Pak Ansory itu sudah ada ya sehingga apabila ini disetujui maka harapan Pak Ansory pun menjadi lebih panjang lagi.

Demikian kira-kira Pak Kepala Badan.

**KEPALA BADAN POM RI (Dr. A. ROY SPARRINGA, M.APP.Sc) :**

Ya terima kasih.

Saya menyampaikan Bu Sestama tolong tetapi memang jumlahnya tidak yang kita harapkan tadi, sebetulnya di pusat pos badan itu memungkinkan tentu ada tetapi tidak cukup besar, sehingga kalau ini tembus yang pusat kewaspadaan tentu akan baik mengakomodir keinginan Anggota Dewan Komisi IX DPR RI.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih.

Paling tidak apa yang pernah terjadi jangan cepat berlalu kira-kira begitulah.

Baik,

**Bapak dan Ibu Anggota yang saya hormati.**

Setelah kita sama-sama mendengarkan dan menyimpulkan Rapat De ngar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan RI maka kami nyatakan rapat pembahasan ini telah selesai dan saya nyatakan ditutup secara resmi.

Mengucapkan terima kasih kepada Teman-teman dari Kepala Badan POM dan juga Teman-teman Pimpinan, Anggota Komisi IX DPR RI, saya persilakan untuk kembali ke jalan yang benar ke rumahnya masing-masing karena banyak banjir ya Pak, karena sudah 3 hari disini dan mungkin buat Teman-teman Banggar yang masih bertugas bisa ikut memperjuangkan harapan-harapan dari Badan POM malam hari ini hingga esok hari.

Terima kasih.

*Wabilahi Taufik Wal Hidayah,*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.55 WIB)**

**Jakarta, Februari 2015**

**a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**Ttd,**

**MUHAMMAD YUS IQBAL, SE  
NIP. 196707171993031006**